

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Kediri merupakan wilayah sentra produksi komoditas tebu. Kediri sendiri menjadi wilayah urutan ke dua setelah Malang sebagai produksi tebu tertinggi di Indonesia. Secara keseluruhan luas wilayah Kabupaten Kediri memiliki luasan sekitar $1.386,05 \text{ Km}^2$ atau sekitar 5% dari luas wilayah Provinsi Jawa Timur, dimana Kabupaten Kediri memiliki 26 Kecamatan, serta 343 Desa dan 1 Kelurahan. Dari total wilayah Kabupaten Kediri 138,605 Ha, guna lahan dengan luasan yang paling besar adalah sawah sebesar 47.580 Ha atau sekitar 34,33% dari total luas wilayah, disusul oleh guna lahan bangunan dan perkarangan sebesar 28,178 Ha atau sekitar 20,33%, sedangkan guna lahan ladang/tegal sendiri sebesar 26,714 Ha atau sekitar 19,27%, guna lahan hutan sebesar 17.735 Ha atau sekitar 12,80%, serta guna lahan kering dengan luasan 18,398 Ha atau sekitar 13,27%. Kediri memiliki potensi yang cukup besar untuk komoditas tebu, karena terdapat tiga pabrik gula yang masih terus beroperasi sampai saat ini di Kediri. Perkembangan usaha tani tebu di Kediri menghadapi permasalahan yang semakin banyak ditengah perkembangan era globalisasi. Luas lahan yang terus menurun setiap tahunnya disamping meningkatnya kebutuhan gula nasional. Hal tersebut justru membuat banyak petani mengurungkan niatnya untuk mengembangkan usaha tani tebu mereka. Tercatat penurunan yang terjadi di Kediri pada tahun 2012-2015 mencapai 591.105,05 Ton atau sekitar 5.705,928 Ha.

Kecamatan Wates menempati kecamatan dengan produksi tebu tertinggi di Kediri pada tahun 2016. Kecamatan wates sendiri memproduksi sekitar 360.465,6 Ton dengan luasan 3.276,96 Ha. Produksi tersebut telah menurun cukup signifikan, dimana penurunan terjadi sekitar 28.384,4 Ton atau 258,04 Ha semenjak tahun 2012. Kondisi Geografis yang dekat dengan pabrik gula sepertinya tidak menjadi jaminan petani untuk terus berupaya meningkatkan produksi mereka, walaupun Kecamatan Wates tergolong sangat dekat dengan dua pabrik yang berada di Kecamatan Kediri.

Desa Sidomulyo merupakan salah satu bagian dari Kecamatan Wates. Desa Sidomulyo tercatat memiliki luasan sekitar 431,82 Ha dengan jumlah keluarga sebanyak 1707 kepala keluarga, dimana sebagian besar penghasilan warga desa

merupakan bertani, dan komoditas tebu menjadi komoditas utama para petani di Desa Sidomulyo. Petani tebu Desa Sidomulyo memproduksi tebu untuk dijual ke pabrik gula, dengan tujuan utama tiga pabrik gula yang berada di Kediri, tetapi tidak semua petani bisa menjual langsung ke pabrik gula terutama para petani kecil yang tidak memiliki akses untuk menjual secara langsung. Banyak petani kecil yang hanya bisa menjual hasil tani mereka ke tengkulak ataupun melalui petani besar, dengan harga yang tentu tidak pasti. Sistem bagi hasil yang dirasa sangat tidak menguntungkan para petani membuat banyak petani kecil untuk tidak mau lagi melakukan usaha tani tebu. Permasalahan timbul dimulai dari dikuasainya koperasi tani oleh pihak-pihak tertentu saja, sampai kepada tidak ada transparansi hasil rendemen yang diuji oleh pabrik.

Kondisi perkembangan usaha tani tebu yang semakin memburuk dirasakan oleh para petani kecil di Desa Sidomulyo. Terdapat petani kecil yang beralih ke tanaman pangan untuk mengganti usaha tani tebu mereka, dengan modal usaha yang kecil dan kepastian pasar membuat petani kecil merasa lebih nyaman dengan usaha tani tanaman pangan. Tentu hal tersebut dapat menjadi masalah karena letak geografis Desa Sidomulyo yang dekat dengan pabrik gula seharusnya bisa fokus kepada usaha tani tebu. Para petani mengeluhkan tentang besaran rendemen yang ditawarkan oleh pabrik gula di Kediri sangatlah kecil dibandingkan dengan penawaran pabrik gula yang ada di Lamongan. Peran pemerintah sangatlah penting terutama dalam perumusan kebijakan yang dapat memberikan kepastian pasar kepada para petani tebu.

5.2 Karakteristik Responden Petani Tebu

Penelitian ini akan dilakukan dengan mengambil 33 sampel yang diambil secara *probability sampling* dengan menggunakan pendekatan *simple random sampling*, dengan itu peneliti menetapkan jumlah sampel yang homogen berdasarkan teknologi yang digunakan oleh petani. Setiap sampel petani tebu memiliki atau menyewa lahan. Penelitian ini akan mengkaji karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir dan luas lahan usaha tani.

Tabel 7. Karakteristik petani tebu berdasarkan jenis kelamin, dan usia

Karakteristik Responden	Jumlah Responden	Persentase (%)
Jenis Kelamin		
a. Laki-Laki	28	86
b. Perempuan	5	14
Jumlah	33	100
Usia		
a. 21 – 35 tahun	2	6
b. 36 – 50 tahun	6	18
c. \geq 51 tahun	25	76
Jumlah	33	100
Pendidikan		
a. Tidak Bersekolah	0	0
b. Tidak Tamat	0	0
c. Tamat SD	16	49
d. Tamat SMP	6	18
e. Tamat SMA	10	30
f. D3	0	0
g. Sarjana/Lebih	1	3
Jumlah	33	100

Sumber: Olahan Hasil Data Primer 2018

Sebagian besar petani masih di dominasi oleh jenis kelamin laki-laki data tersebut dapat dilihat pada Tabel 7, dimana jenis kelamin laki laki mencapai 86% dan perempuan hanya 14%. Hal tersebut dapat berpengaruh terhadap setiap keputusan yang diambil dalam menjalankan kegiatan usaha tani mereka. Pengaruh jenis kelamin melambangkan bahwa peran laki-laki terhadap suatu usaha tani sangatlah besar tetapi bukan berarti jenis kelamin perempuan tidaklah penting. Kemungkinan terbesar jenis kelamin laki-laki mendominasi karena besarnya peran kepala rumah tangga didalam mencari nafkah untuk keluarga petani. Tentu penentuan preferensi petani dapat berpengaruh oleh jenis kelamin, tetapi pada penelitian kali ini peneliti tidak akan menjelaskan tentang topik tersebut.

Generasi petani tebu di Desa Sidomulyo dapat dikatakan minim ada generasi penerus. Pada Tabel 7 dapat dilihat bahwa umur produktif 21-35 Tahun hanyalah 2 orang atau 6% dari jumlah responden, dimana umur 36-50 tahun sebesar 18%, dan usia terbanyak berada pada rentan usia lebih dari 51 tahun dengan persentase sebesar 76%. Usia sangatlah mempengaruhi pola pikir dan semangat petani untuk terus meningkatkan produktivitas usaha tani mereka. Ketika petani di dominasi oleh usia yang sudah tua dapat membuat produktivitas usaha tani mereka tidak

maksimal, karena sedikitnya inovasi dan sulitnya menangkap informasi yang berkembang.

Pendidikan sendiri terdiri atas pendidikan formal dan non-formal, tetapi pada penelitian kali ini peneliti hanya fokus pada pendidikan formal saja. Jenjang pendidikan dapat membentuk konsepsi berbeda tentang cara bertani setiap individu. Pada Tabel 7 dapat dilihat bahwa sebagian besar petani merupakan lulusan sekolah dasar, dimana responden dengan pendidikan Tamat SD mencapai 49%, pendidikan Tamat SMP sebesar 18%, dilanjutkan oleh Tamat SMA dengan persentase sebesar 30%, dan tingkat pendidikan persentase paling rendah adalah Sarjana sebanyak 1 orang atau 3%. Jenjang pendidikan responden menjelaskan bahwa sebagian besar petani kecil hanya berpendidikan rendah, dengan tingkat pendidikan rendah ilmu pengetahuan petani tentu sangat minim, walaupun ilmu pengetahuan tentang praktik sangatlah bagus. Tentu pemerintah harus banyak melakukan penyuluhan dan pelatihan terhadap para petani kecil, karena dengan pelatihan petani kecil mampu menyerap segala informasi yang belum dimiliki sebelumnya, walaupun petani kecil menganggap pelatihan tidaklah penting. Pemerintah harus lebih berperan aktif dalam meningkatkan kualitas individu setiap petani demi mencapai titik optimum dalam melakukan usaha tani mereka.

Tabel 8. Karakteristik petani tebu berdasarkan Pendidikan, dan Luas lahan.

Karakteristik Responden	Jumlah Responden	Persentase (%)
Status Lahan		
a. Miliki Sendiri	31	94
b. Penggarap bagi hasil	0	0
c. Sewa	2	6
Jumlah	33	100
Luas lahan yang diusahakan		
a. < 5000 m ²	22	70
b. 5000 m ² - 1 ha	8	24
c. 1 ha - 2 ha	3	6
Jumlah	33	100

Sumber: Olahan Hasil Data Primer 2018

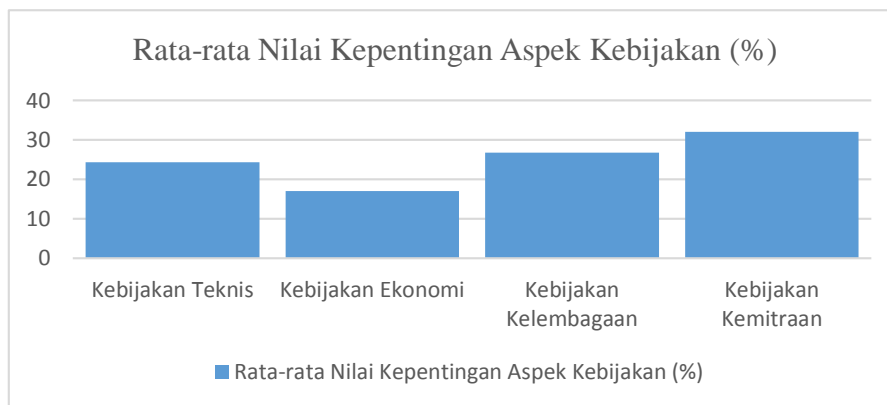
Petani tebu di Desa Sidomulyo sebagian besar memiliki lahan garapan mereka sendiri. Tercatat 33 responden atau 94% dari jumlah responden memiliki lahan mereka sendiri, dan 2 responden atau 6% petani melakukan sewa lahan.

Status lahan dapat menjelaskan kondisi petani kecil di Desa Sidomulyo apakah membutuhkan perhatian lebih tentang input produksi atau tidak, karena dengan petani menyewa lahan input produksi petani akan semakin bertambah sehingga pemerintah harus merumuskan kebijakan yang dapat meringankan kebutuhan input para petani.

Luas lahan petani tebu di Desa Sidomulyo di dominasi oleh luas lahan dibawah 5000 m². Petani dengan luas lahan dibawah 5000 m² tercatat mencapai 23 responden atau 70% dari jumlah responden, sedangkan petani yang memiliki luas lahan 5000 m² – 1 ha tercatat mencapai 8 responden atau 24%, dan petani dengan luasan 1 ha – 2 ha mencapai 3 responden atau 6% dari jumlah responden.

5.3 Analisis Preferensi Petani Terhadap Atribut Kebijakan Pertanian

Pada penelitian ini peneliti menggunakan 4 aspek kebijakan yaitu aspek teknis, aspek ekonomi produksi, aspek kelembagaan, dan aspek kemitraan untuk diolah menggunakan alat analisis konjoin. Berdasarkan hasil olah data didapatkan hasil seperti pada Gambar 2. Tingkat kepentingan tertinggi adalah aspek kemitraan (31,982%), dilanjutkan oleh aspek kelembagaan (26,770%), aspek teknis (24,245%), dan aspek ekonomi produksi (17,003%).



Gambar 2. Rata-rata Nilai Kepentingan Aspek Kebijakan Pertanian (%)

5.3.1 Aspek Kemitraan

Berdasarkan hasil yang diperoleh, petani lebih mementingkan kebijakan kemitraan yang mana didalamnya terdapat 2 taraf yaitu kebijakan kontrak usaha tani dan kebijakan temu usaha. Petani tebu lebih memilih kebijakan usaha tani

farming dibandingkan kebijakan temu usaha seperti yang bisa dilihat pada Lampiran 7. Hal tersebut disebabkan karena banyak petani yang tidak memiliki kepastian dalam menjual hasil tebu mereka. Terutama petani kecil, dimana terbiasa menjual ke tengkulak atau petani besar, dan tidak memiliki akses untuk menjual langsung ke pabrik gula. Tentu dengan adanya perantara antara petani dan pabrik gula dapat membuat keuntungan petani kecil berkurang.

Kebiasaan petani menjual hasil panen mereka kepada tengkulak atau petani besar terkadang membuat mereka harus mengalami kerugian karena murah nya harga yang ditawarkan tengkulak dan petani besar kepada para petani kecil. Tengkulak dan petani besar beralasan bahwa harga pada tingkat pabrik sangat murah yang menyebabkan mereka harus memberikan penawaran harga yang kecil kepada petani kecil. Petani kecil mengeluh tentang banyaknya pihak-pihak yang selalu ingin mengambil keuntungan untuk diri mereka sendiri atau kelompok-kelompok tertentu.

Fakta di lapang menjelaskan bahwa permasalahan murah nya harga tebu pada tingkat petani disebabkan oleh banyaknya pihak-pihak yang memainkan rendemen tebu pada tingkat pabrik gula. Tentu hal tersebut dilakukan oleh para pihak yang bekerja di pabrik gula, walaupun pada faktanya keadaan pabrik gula yang dimiliki oleh BUMN selalu mengalami defisit anggaran. Hal tersebut dapat disebabkan oleh banyak faktor, terdapatnya korupsi dan kolusi pada tingkat pabrik tentu menjadi fakta yang tidak bisa disanggah. Pemerintah harus jeli dan menyadari permasalahan-permasalahan yang menyebabkan indonesia tidak pernah bisa swasembada gula. Kebiasaan yang telah menjadi budaya di tingkat pabrik gula membuat petani terus mengalami kerugian terutama para petani kecil, dimana hal tersebut dapat menyebabkan menurunnya gairah petani dalam melakukan budidaya tebu terutama para petani kecil yang selalu mengalami kerugian.

Permasalahan tersebut terus meruntut pada berkurangnya lahan tebu di Desa Sidomulyo. Petani tebu dengan skala kecil tentu lebih memilih menjual lahan mereka kepada pengembang properti dibandingkan harus menelan kerugian setiap melakukan budidaya tebu. Sebagian dari petani tebu dengan skala kecil di Desa Sidomulyo memilih untuk berpindah komoditas dari komoditas tebu menjadi komoditas pangan, karena komoditas pangan dirasa lebih memiliki kepastian

harga dan petani tebu pun bisa mengkonsumsi hal panen mereka secara langsung atau menjualnya ke pasar secara langsung. Tentu hal tersebut akan menjadi sebuah masalah karena letak geografis Desa Sidomulyo yang dekat atau bisa dikatakan strategis dengan pabrik gula saja sudah banyak petani tebu yang mengurungkan niatnya untuk melakukan budidaya tanaman tebu, apabila daerah yang dekat dengan pabrik gula saja sudah enggan melakukan budidaya tanaman tebu, tentu pada petani kecil daerah lain yang lebih jauh tidak akan mau melakukan budidaya tanaman tebu.

Permasalahan tersebut diharapkan dapat diselesaikan dengan dibuatnya kebijakan kontrak usaha tani antara petani tebu dan pabrik gula, dimana kontrak usaha tani dapat menjadi solusi permasalahan petani kecil, karena hal tersebut bisa memberikan kepastian pasar kepada para petani kecil. Kontrak usaha tani diharapkan dapat memotong panjangnya rantai pasok komoditas tebu di Desa Sidomulyo. Kontrak usaha tani juga dapat menghilangkan para pihak yang memainkan rendemen tebu para petani, dengan adanya peran pemerintah pusat melalui pemerintah daerah sebagai pihak perantara yang menentukan harga dasar penjualan tebu diharapkan dapat mengurangi bahkan menghilangkan para pihak yang memainkan rendemen tebu para petani. Kebijakan kontrak usaha tani harus memiliki peraturan-peraturan yang adil, dan tidak merugikan petani tebu.

5.3.2 Aspek Kelembagaan

Aspek kelembagaan berada pada urutan kedua berdasarkan tingkat kepentingannya. Aspek kelembagaan sendiri terdapat 2 taraf yaitu kebijakan pengembangan petani kawasan dan kebijakan koperasi petani. Berdasarkan hasil analisis konjoin, utilitas terbesar berada pada kebijakan koperasi petani seperti pada Lampiran 7. Petani lebih memilih kebijakan koperasi petani karena koperasi dianggap bisa menjadi wadah para petani kepada pemerintah dan pabrik gula, tetapi terdapat permasalahan dilapang. Berdasarkan hasil keterangan para petani kecil, koperasi di Desa Sidomulyo bahkan di Kecamatan Wates dikuasi oleh petani petani besar dan pihak-pihak tertentu saja seperti bagian atau perwakilan pabrik gula. Koperasi tidak pernah melibatkan para petani kecil dalam membuat keputusan, dimana banyak keputusan yang berdampak pada kerugian para petani tebu dengan skala kecil. Tentu hal tersebut dapat membuat para petani kecil mengalami

kerugian, karena tidak adanya informasi yang bisa mereka dapatkan ataupun tidak adanya bantuan pemerintah yang sampai kepada petani kecil, dengan dilakukannya pembenahan atau perombakan sistem mengenai struktur organisasi yang ada dikoperasi diharapkan dapat mengurai permasalahan penguasaan koperasi oleh segelintir pihak dan memberikan akses kepada para petani kecil untuk terlibat didalamnya. Pemerintah juga harus memberikan wadah pengaduan yang mudah untuk diakses oleh petani kecil apabila terjadi permasalahan, karena berdasarkan keterangan dilapang para petani kecil secara administratif sebenarnya terdaftar didalamnya, tetapi hal tersebut hanyalah sekedar formalitas saja.

5.3.3 Aspek Teknis

Aspek Teknis mendapatkan urutan ketiga berdasarkan hasil analisis. Aspek teknis sendiri terdiri atas 3 taraf yaitu kebijakan pembangunan irigasi, kebijakan perbaikan unit teknis demo plot, dan kebijakan perbaikan unit teknis penyuluhan. Kebijakan pembangunan irigasi mendapatkan utilitas terbesar petani kecil seperti pada Lampiran 7. Infrastruktur dasar seperti saluran irigasi yang tersedia untuk publik dapat menurunkan biaya kegiatan budidaya dan pada saat bersamaan dapat meningkatkan produktivitas pertanian petani (Lai C *et al*, 2017). Kebijakan pembangunan irigasi sendiri menjadi keinginan petani dikarenakan memang belum adanya saluran irigasi tebu yang baik di Desa Sidomulyo. Orgeron (2003), dalam penelitiannya menyatakan bahwa produktifitas di india meningkat sekitar 2 kg/ha karena digunakannya teknik irigasi. Pada lahan kering pengaruh irigasi sangatlah besar, sehingga salah satu solusi mendorong intensifikasi adalah dengan memberikan irigasi yang baik dan benar (Hakim M, 2010). Berkurangnya lahan pertanian terutama di Desa Sidomulyo merupakan hal yang mengawatirkan karena akan berdampak pada berkurangnya jumlah produksi, dengan pemerintah memberikan fasilitas budidaya seperti pembangunan irigasi diharapkan dapat mengembalikan kembali gairah para petani untuk menanam tebu karena adanya peningkatan produktifitas akibat saluran irigasi yang baik. Lee dan Hsu (2009) berpendapat bahwa investasi publik yang dilakukan pemerintah dalam bidang pertanian dan produktivitas lahan pertanian terbukti dapat menunjukkan hubungan positif yang signifikan dalam jangka panjang.

5.3.4 Aspek Ekonomi Produksi

Aspek ekonomi produksi menjadi atribut dengan tingkat kepentingan paling rendah. Aspek ekonomi produksi sendiri terdiri atas 3 taraf yaitu kebijakan harga hasil pertanian, kebijakan harga pupuk, dan kebijakan harga benih. Kebijakan harga hasil pertanian menjadi taraf dengan utilitas tertinggi seperti Lampiran 7. Hal tersebut disebabkan karena petani tebu lebih mementingkan kepastian harga dibandingkan adanya subsidi pupuk ataupun benih. Anderson *et al* (2013) pada dua dekade terakhir telah terlihat adanya pergeseran bantuan kebijakan yang semulanya dari dukungan harga menjadi dukungan pendapatan, dimana terkait dengan adanya perubahan instrumen kebijakan yang digunakan dalam program pemerintah yang mendukung pendapatan pertanian. Setelah tahun 1990an, instrumen kebijakan pertanian berubah dari dukungan harga menjadi kontrak produksi yang fleksibel di Amerika Serikat dan untuk di negara Turki, Jepang, dan Meksiko mereka mengarahkan kebijakan menjadi dukungan pendapatan para petani (Demirdogen A *et al*, 2016). Pemerintah Indonesia harus jeli dalam mengikuti perkembangan kebijakan di dunia, dan bisa melihat dampak positif setiap kebijakan yang bisa berdampak lebih baik secara jangka panjang.

Kebijakan harga dasar dianggap sangat penting oleh petani kecil karena seringkali harga jual yang berfluktuasi. Harga berfluktuasi tentu disebabkan oleh banyak hal dan salah satunya adalah adanya kebijakan import gula rafinasi. Gula kristal rafinasi yang digunakan untuk kebutuhan industri menjadi sebuah masalah para petani. Kebijakan yang dianggap tidak akan berdampak pada harga jual tebu ditingkat petani justru berdampak sebaliknya. Import gula kristal rafinasi mengakibatkan harga jual tebu ditingkat petani melemah. Pemerintah tentu harus memberikan intervensi terhadap pasar, dengan mengkombinasikan kebijakan harga hasil pertanian dengan kebijakan kontrak farming diharapkan bisa memberikan solusi atas naik turunnya harga jual tebu ditingkat petani. Petani harus dalam keadaan mendapatkan keuntungan karena hal tersebut akan berdampak pada musim tanam selanjutnya. Terdapat beberapa cara untuk menstabilkan harga yaitu kontrol areal dan kuota pemasaran ditingkat petani, kuota pemasaran di tingkat pabrik, dan embargo import gula (Hardaker, J.B *et al*, 1970). Sehingga dengan melakukan

kuota pemasaran di tingkat pabrik pemerintah tidak perlu lagi melakukan import gula rafinasi yang ditujukan untuk kebutuhan industri.

Tabel 9. Nilai Utilitas Agregat Aspek Kebijakan

Aspek Kebijakan	Taraf	Utility	Std. Error
Aspek Teknis	Pembangunan Irigasi	.752	.000
	Perbaikan UT. Demo Plot	-.419	.000
	Perbaikan UT. Penyuluhan	-.332	.000
Aspek Ekonomi Produksi	Harga Hasil Panen	.206	.000
	Harga Pupuk	-.194	.000
	Harga Benih	-.012	.000
Aspek Kelembagaan	Pengembangan Petani Kawasan	-.705	.000
	Pengembangan Koperasi Petani	.705	.000
Aspek Kemitraan	Kontrak Farming	1.015	.000
	Temu Usaha	-1.015	.000
Constant		13.497	.000

Sumber: Olahan Hasil Data Primer 2018

Pada Tabel 9 dapat dilihat hasil analisis konjoin berupa estimasi nilai utilitas dari 4 atribut. Utilitas tersebut dapat dilihat setiap aspek kebijakan, sehingga bukan dilihat nilai utilitas secara keseluruhan. Hasil analisis akan memperlihatkan kombinasi atau stimuli terbaik di antara 4 aspek kebijakan tersebut. Pada kasus kali ini terdapat aspek kebijakan, peneliti menjadikan penelitian ini untuk menggambarkan sebuah paket kebijakan yang pemerintah bisa tawarkan kepada petani melalui preferensi petani terhadap beberapa kebijakan pilihan yang terdapat didalam masing-masing atribut.

Pada aspek teknis terdapat 3 taraf didalamnya, dimana hasil menggambarkan semua utilitas berada dibawah 0. Nilai pada utilitas tersebut tidak dapat dibandingkan dengan nilai utilitas pada atribut lain, sehingga taraf terbaik pada aspek teknis adalah pembangunan irigasi. Aspek ekonomi memiliki taraf dengan nilai tertinggi adalah harga hasil panen, dilanjutkan dengan aspek kelembagaan memiliki taraf tertinggi adalah pengembangan koperasi petani, dan nilai dengan taraf tertinggi pada aspek kemitraan adalah kontrak farming, sehingga dapat disimpulkan paket kebijakan terbaik yang ditawarkan pemerintah adalah kebijakan kontrak farming pada aspek kemitraan, kebijakan pengembangan koperasi petani pada aspek kelembagaan, kebijakan harga hasil panen pada aspek teknis, dan kebijakan pembangunan irigasi pada aspek ekonomi produksi.

Hasil dari analisis dapat dikatakan sangat terkait antara satu kebijakan dengan kebijakan lainnya, dan diharapkan kombinasi kebijakan tersebut dapat menjadi solusi permasalahan yang terjadi pada petani tebu Desa Sidomulyo. Paket kebijakan yang ditawarkan menjadi satu kesatuan yang harus dilakukan selaras oleh pemerintah, karena ketika dibuatnya kebijakan kemitraan farming, pemerintah harus memperbaiki sistem yang ada pada koperasi petani atau memastikan koperasi dapat menjadi wadah petani secara keseluruhan. Hal tersebut menjadi pertimbangan karena koperasi merupakan penghubung antara pemerintah dan para petani. Melakukan kontrak melalui koperasi tani adalah sesuatu yang menjanjikan, karena tindakan kolektif dalam kelompok dapat membantu mengurangi biaya transportasi dan juga bisa meningkatkan kualitas dan konsistensi pasokan produk (Ochieng DO *et al*, 2017), sehingga pemerintah harus serius menanggapi permasalahan-permasalahan yang terjadi di koperasi tani.

Pemerintah dapat melakukan intervensi terhadap harga pada tingkat petani melalui kontrak farming yang dibentuk antara pabrik gula dan petani tebu, dimana pemerintah ikut serta didalam pembuatan peraturan kontrak farming, dan setiap pabrik gula harus menaati setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tentang harga dasar. Pengeluaran harga dasar dapat dilakukan melalui pertimbangan perhitungan harga pokok penjualan dan harga gula ditingkat konsumen.

Kebijakan selanjutnya adalah pembangunan irigasi. Pembangunan irigasi diharapkan dapat menjadi pendorong produktivitas tanaman tebu para petani, dimana pemerintah mendorong peningkatan produktivitas melalui tersedianya air yang cukup untuk kebutuhan budidaya tebu, sehingga produktivitas tebu dapat berproduksi secara maksimal. Hal tersebut juga bisa mendokrak keinginan masyarakat untuk kembali lagi melakukan budidaya tebu yang sebelumnya berhenti atau mengurangi kegiatan budidaya tebu mereka. Tentu paket kebijakan tersebut tidaklah mudah untuk direalisasikan tetapi demi mencapai swasembada gula pemerintah harus berani untuk mencoba paket kebijakan yang didasari oleh preferensi petani.

5.4 Implikasi Kebijakan Terhadap Preferensi Petani Tebu

Penelitian ini menemukan hasil kombinasi kebijakan yang dapat dirumuskan oleh pemerintah dalam masing-masing aspeknya. Kebijakan kontrak farming dalam aspek kemitraan menjadi kebijakan yang harus diutamakan pemerintah dalam merumuskan kebijakan komoditas tebu, sehubungan kecilnya skala penelitian ini, peneliti menyadari bahwa hasil dari penelitian ini tidak dapat secara langsung dijadikan pertimbangan dalam kebijakan komoditas tebu skala nasional. Tetapi, pemerintah dapat mencoba hasil penelitian ini dengan menjadikan Desa Sidomulyo sebagai tempat percobaan perumuskan kebijakan komoditas tebu berdasarkan preferensi petani, apabila hasil perumusan kebijakan berdasarkan preferensi petani berhasil dan mengarah pada pertumbuhan yang positif, pemerintah dapat melakukan penelitian kembali dengan skala yang lebih luas untuk dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam perumuskan kebijakan pertanian komoditas tebu.

5.4.1 Implikasi Kebijakan Aspek Teknis

Hasil analisis pada aspek teknis menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan irigasi lebih diinginkan petani tebu dibandingkan perbaikan unit teknis demo plot dan perbaikan unit teknis penyuluhan. Kebijakan pembangunan irigasi seharusnya memang sudah menjadi kewajiban pemerintah dalam memberikan fasilitas atau layanan kepada petani tebu. Hal tersebut disebabkan karena tanaman tebu sendiri memang membutuhkan ketersediaan air yang cukup. Sudah banyak penelitian dengan skala luas menjelaskan bahwa pembangunan irigasi merupakan faktor terpenting dalam melakukan budidaya tanaman tebu. Pemerintah pusat sudah memiliki program pembangunan irigasi dalam skala nasional, dengan penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang dapat memperkuat informasi tentang kebutuhan petani tebu mengenai pentingnya saluran irigasi kelangsungan usaha tani tebu, sehingga pemerintah dapat mengalokasikan dana pembangunan irigasi kepada daerah yang memiliki sentra komoditas tebu.

5.4.2 Implikasi Kebijakan Aspek Ekonomi Produksi

Hasil analisis pada aspek ekonomi produksi menunjukkan bahwa kebijakan harga hasil panen menjadi kebijakan yang lebih diinginkan petani tebu di Desa Sidomulyo, dalam implikasinya kebijakan harga hasil panen hanya bisa dilakukan dengan cara menunjuk salah satu pabrik gula milik BUMN di daerah Kediri sebagai mitra petani tebu. Pemilihan pabrik gula sendiri didasari pada kesiapan pabrik gula dalam menerapkan kebijakan harga hasil panen yang dikeluarkan oleh pemerintah. Penerapan intervensi pada peraturan yang dibuat antara petani tebu dan pabrik gula harus dilakukan dengan dasar keuntungan yang adil diantara kedua belah pihak, dalam segala sisi harus memberikan keuntungan yang adil dan tidak menimbulkan harga dasar yang justru dibawah harga pokok penjualan tebu. Penentuan harga hasil panen sendiri dilakukan oleh pemerintah pusat melalui pemerintah daerah dengan melihat harga gula yang beredar di masyarakat. Penentuan harga hasil panen tidak boleh dilakukan oleh pabrik gula karena tentu hal tersebut hanya akan menambah kerugian petani dan hanya akan mengutamakan keuntungan pada pabrik gula saja.

5.4.3 Implikasi Kebijakan Aspek Kelembagaan

Hasil analisis pada aspek kelembagaan sendiri menunjukkan bahwa kebijakan pengembangan koperasi petani menjadi kebijakan yang paling diinginkan. Hal tersebut disebabkan karena dikuasanya koperasi petani oleh petani besar dan pihak-pihak tertentu saja, sehingga pemerintah harus membenahi terlebih dahulu koperasi yang sudah ada dengan cara melakukan pendataan ulang petani yang ikut serta didalam koperasi. Pemerintah harus memberikan sebuah layanan yang mudah diakses oleh semua pihak terutama para petani kecil komoditas tebu di Desa Sidomulyo. Layanan pengaduan dapat memberikan informasi yang jelas kepada pemerintah dan pemerintah dapat memberikan respon dengan cepat, dalam kelanjutan permasalahan koperasi petani pemerintah dapat melakukan penataan ulang struktur organisasi koperasi petani dengan melibatkan semua pihak didalamnya, sehingga dalam satu struktur organisasi semua pihak memiliki suara yang sama dan bisa menyuarakan pendapatnya dengan baik. Permasalahan di Desa Sidomulyo petani kecil tidak ikut serta didalam koperasi dikarenakan belum mengertinya petani kecil mengenai cara berorganisasi yang baik. Pemerintah dapat

melakukan penyuluhan mengenai koperasi petani terkait struktur organisasi dan melakukan pendampingan dalam kurun waktu tertentu, sehingga kesiapan petani untuk ikut terlibat dalam koperasi telah matang dan bisa mengembangkan koperasi petani di Desa Sidomulyo.

5.4.4 Implikasi Kebijakan Aspek Kemitraan

Hasil analisis pada aspek kemitraan menunjukkan bahwa kebijakan kontrak usaha tani menjadi kebijakan yang paling diinginkan oleh petani. Kebijakan usaha tani sendiri dapat dilakukan dengan menunjuk salah satu pabrik gula di Kediri milik BUMN. Pemilihan pabrik gula sendiri didasari dengan kesiapan pabrik gula untuk menjadi mitra para petani tebu di Desa Sidomulyo, apabila pabrik belum siap pemerintah harus melakukan pembinaan dalam kurun waktu tertentu dan tidak memakan waktu banyak. Pemerintah pusat melalui pemerintah daerah dapat melakukan intervensi peraturan yang dibuat antara pabrik gula dan petani. Pemerintah juga harus menjadi pihak ketiga yang adil dan tidak merugikan kedua belah pihak. Kebijakan kontrak usaha tani sendiri dilakukan dengan dasar memberikan kepastian pasar kepada para petani tebu di Desa Sidomulyo. Peraturan penentuan harga dasar yang dilakukan didalam kontrak usaha tani juga harus didasari pada harga peredaran gula di masyarakat dan harga pokok penjualan tebu di tingkat petani. Penentuan harga dasar harus dilakukan oleh pemerintah dan hal tersebut tertuang didalam peraturan kontrak usaha tani. Pabrik gula harus mematuhi setiap harga dasar yang dikeluarkan oleh pemerintah demi memberikan keadilan diantara kedua belah pihak.